

KOORDINASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Jeanne Darc Noviyanti Manik *

* Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung,
Email korespondensi: novi_palembang@yahoo.com

Info Naskah:

Diterima	Direvisi	Disetujui
12 September 2017	15 Desember 2017	16 Februari 2018

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana (SPP), keberhasilan proses penegakan hukum pidana, diprakarsai oleh proses penyidikan oleh penyidik diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan persidangan pengadilan sidang oleh hakim sampai dengan pelaksanaan putusan hakim oleh Jaksa dan pemyarakatan petugas (jika terbukti bersalah). Tindakan pencegahan masih diberikan mendahului melalui pengembangan preventif dan dasar prinsip kewajiban umum dari polisi, yaitu mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat masalah hukum dalam penelitian ini adalah bentuk koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan penyidik polisi dalam penyelidikan tindak pidana pengelolaan sumber daya alam. Jenis penelitian ini penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam melaksanakan fungsinya dengan penegakan hukum pada kegiatan penyelidikan kejahatan di area pengelolaan sumber daya alam, kegiatan-kegiatannya tidak telah terintegrasi sehingga keamanan dan penegakan hukum memiliki tidak akan optimal. Koordinasi PPNS di bidang pengelolaan sumber daya alam dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu hubungan tata cara kerja, pembinaan teknis, dan bantuan operasional penyidikan. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik.

Keywords: Koordinasi; penyidikan, tindak pidana, sumber daya alam, penyelidik

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam negara Indonesia, maka pasal tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka upaya memahami pasal tersebut tidak terlepas dari pemikiran kesejahteraan sosial.¹

Ketentuan pasal tersebut apabila dicermati menegaskan dua prinsip pokok, yakni :

a. Sumber daya alam, dalam artian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia berada di bawah penguasaan negara.

b. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat

Indonesia pada masa sekarang dan generasi mendatang.²

Pelaksanaan ketentuan konstitusional ini dilandasi oleh prinsip-prinsip perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dan persatuan ekonomi nasional.

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Oleh

¹Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm.55

² Bambang Iriana Djajaatmadja, *Harmonisasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2007), hlm.52

karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang ada kaitannya dengan sumber daya alam seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan.

Dalam sistem peradilan pidana, keberhasilan suatu proses penegakan hukum pidana, diawali oleh proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dan penyidik, dilanjutkan oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim sampai dengan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan (jika terbukti bersalah).

Dikaji dari perspektif Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut

KUHAP), ditegaskan bahwa pejabat penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus.

Selama ini luas lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih dan inkonsistensi kewenangan penyidikan antara beberapa institusi seperti pada penyidik tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan hubungan kordinasi antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum di dalam masyarakat. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) yaitu :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

(4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

(5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

(6) Mengambil sidik jari seseorang;

(7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

(8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

(9) Mengadakan penghentian penyidikan;

(10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan. Dimensi penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga proses melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan berupa aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
- c. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*)
- d. Cara tindak pidana dilakukan
- e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
- f. Latar belakang sampai tindak pidana dilakukan

g. Siapa pelakunya.

Namun muncul persoalan, adalah mengenai mekanisme dan bentuk koordinasi di antara instansi tersebut. Pertanyaan ini mengemuka karena dalam realitas penegakan hukum banyak institusi yang terlibat dalam proses penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam, dengan aturan yang dikeluarkan secara sektoral. Di samping itu pertanggung jawabannya akan berpusat pada instansi masing-masing, yang mengakibatkan apabila ada mekanisme tidak diatur secara jelas akan menimbulkan konflik di antara instansi tersebut yang akan berimplikasi pada proses penegakan hukumnya. Secara teoritis, problematika ditunjukkan dengan adanya pergeseran konsep sistem peradilan pidana yang mengutamakan koordinasi antara sub-sub sistem peradilan pidana yang diantaranya sub sistem penyidikan, bahwa Polri menjadi koordinator dan pengawasan (Korwas) bagi penyidik lainnya. Namun dalam peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti tersebut terdahulu, terjadi tarik ulur dan tumpang tindih kewenangan antara pihak penyidik Polri dengan penyidik lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Menetapkan metode penelitian hukum hendaklah beranjak dari hakikat keilmuan hukum. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan atas karakteristik ilmu hukum tersebut, penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum ini beranjak dari pemahaman bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian untuk keperluan praktis dan penelitian untuk keperluan akademis. Penelitian hukum untuk keperluan akademis untuk memberikan sumbangan baru bagi pemikiran perkembangan ilmu hukum, menemukan jawaban baru bagi masalah atau isu hukum, mengembangkan atau menemukan konsep serta teori hukum baru terhadap hal-hal yang telah melembaga dalam ilmu hukum.³

Fungsi penelitian hukum untuk mendapatkan kebenaran koherensi⁴, yakni

³ Tim Penyusun FH UB, Tim Penyusun FH UB, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian & Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Malang : Program Pascasarjana Fakultas Hukum UB, 2013), hlm.4

⁴ Ada empat teori kebenaran, teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis dan teori kebenaran semantik. Teori kebenaran korespondensi berbasis

mencari koherensi atau kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Logika keilmuan dalam penelitian hukum dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang-undangan.⁵ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,⁶ khususnya yang berkenaan dengan norma yang mengatur penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan

pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibagi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penelusuran bahan primer dan sekunder dilakukan secara studi literatur (kajian pustaka) dan *searching internet* serta inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan.⁷ Hasil analisis dengan menggunakan logika hukum, argumentasi hukum dan asas-asas hukum yang akan menghasilkan kesimpulan atau *conclusion*⁸ sebagai

fakta atau realita. Suatu pernyataan adalah benar apabila sesuai dengan realitas. Teori kebenaran korespondensi cocok untuk ilmu-ilmu empiris. Teori kebenaran korespondensi berpangkal pada apa yang dipercaya dalam pikiran. Suatu pernyataan benar atau salah apabila pernyataan itu sesuai atau tidak sesuai dengan sistem proposisi-proposisi lainnya. Fungsi penelitian kebenaran koherensi untuk mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau aturan sebagai referensi untuk ditelaah. Teori kebenaran pragmatis bersandar pada konsesus. Kegunaan praktis dan efektifitas merupakan tolok ukur kebenaran. Fungsi penelitian pragmatis menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan. Teori kebenaran semantik berdasarkan logika formal berkenaan dengan bahasa, Peter M.Marzuki, *Ibid.*, hlm.47

⁵ Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*, Hlm.57

⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Secara umum dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin analitis adalah sistem ajaran yang menganalisis, memahami dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, misalnya sosiologi, psikologi, ekonomi. Disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, misalnya hukum dan filsafat, G. Sergeant, *Texbook Of Sociology*, (London : Mac Millan Education, 1975), Sebagaimana Dikutip Oleh Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung : Alumni, 1978), hlm.9.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, *Op.Cit.*, hlm.47

jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sangat banyak produk hukum negara yang dibentuk untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan nasional, di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, sampai pada aspek kehidupan religi pun, yang bernuansa sangat pribadi, juga diatur oleh pemerintah. Konsekuensinya, dari satu segi dalam kaitan dengan regulasi pengelolaan sumber daya alam pada tingkatan perundang-undangan

terjadi disharmonisasi pengaturan substansi, inkonsistensi (*inconsistency*), tumpang tindih (*overlapping*), ambiguitas (*ambiguity*), dan kontradiksi (*contradiction*) antara undang-undang yang satu dengan lainnya yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam pengaturan mengenai kewenangan dari lembaga negara yang diatur secara sektoral, tidak secara terintegrasi, dalam pengelolaan sumber daya alam. Perundang-undangan saat ini sudah mengatur struktur organisasi, tetapi belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara spesifik tentang badan/lembaga penyidikan.

Tabel 1.

Pengaturan Tentang Penyidik Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

No	Undang-Undang	Pasal tentang Penyidik	Jenis penyidik
1	Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)	Pasal 6 ayat (1)	1. Penyidik Polri 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil

No	Undang-Undang	Pasal tentang Penyidik	Jenis penyidik
2.	Undang-Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara No. 3419)	Pasal 39 ayat (1)	1. Penyidik Polri 2. Pejabat pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
3.	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)	Pasal 77 ayat (1)	1. Penyidik Polri 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan
4.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136)	Pasal 50 ayat (1)	1. Penyidik Polri 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
5.	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4)	Pasal 149 ayat (1)	1. Penyidik Polri 2. Pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan

No	Undang-Undang	Pasal tentang Penyidik	Jenis penyidik
6	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)	Pasal 94 ayat (1)	1. Penyidik Polri 2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7	Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154)	Pasal 73 ayat (1)	1. Penyidik pegawai negeri sipil perikanan 2. Perwira TNI AL 3. Penyidik Polri
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130)	Pasal 29	1. Penyidik Polri 2. PPNS diberi wewenang khusus
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308)	Pasal 102 ayat (1)	1. Penyidik Polri 2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan

Sumber : Bahan hukum primer diolah.

2. Koordinasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kelembagaan lembaga penegak hukum khususnya penyidik tindak pidana sumber daya alam dalam peraturan perundangan-undangan tersebut, mempunyai fungsi dan peranan yang cukup menentukan dalam

rangka keberhasilan penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mengingat sumber daya alam merupakan aspek pengelolaan sumber daya alam yang akhir-akhir ini sedang bergejolak namun bergabung dengan berbagai masalah kompleks lainnya yang memerlukan tindak pemecahan interdisipliner segera dan serius. Sebagai masalah lingkungan, maka dalam

rangka pemecahannya tentunya memerlukan penanganan secara lintas sektoral. Artinya, ada beberapa lembaga / instansi yang terkait penanganan masalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itulah diperlukan kejelasan struktural dan fungsional dari lembaga / instansi terkait. Hal ini sangat perlu mengingat dari kejelasan penataan lembaga / instansi ini dapat diketahui fungsi dan perannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam secara makro. Dari kejelasan fungsi dan tanggungjawab lembaga dapat disusun suatu strategi kerja baik secara makro dan mikro.

Dengan kejelasan ini, dapat memudahkan suatu koordinasi dari penyidik yang terlibat di dalamnya, baik secara permanen maupun insidental. Dari penataan dan kejelasan keterlibatan, disertai batas-batas fungsi dan tanggungjawab masing-masing lembaga/instansi, akan memudahkan penanganan dan pemecahan masalah-masalah yang timbul dengan segera, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*)

yang diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.⁹ Dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan TNI AL sebagai penyidik, tentunya akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh kepada eksistensi *integrated criminal justice system* dalam KUHAP. Muladi menyatakan bahwa *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.¹⁰ Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

⁹ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm.90.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm.1-2.

Tabel 2.

Wujud Koordinasi Antar Penyidik Tindak Pidana Di Bidang

Pengelolaan Sumber Daya Alam

No	Peraturan yang Mengaturnya	Koordinasi	Pasal yang Mengatur
1	Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.	Pasal 7 ayat (2)
2	Undang-Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara No. 3419)	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Pasal 39 ayat (4)
3	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 77 ayat (3)
4	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 50 ayat (3)

No	Peraturan yang Mengaturnya	Koordinasi	Pasal yang Mengatur
5	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4)	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 150 ayat (2)
6	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia 2. Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan 3. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 94 ayat (3) 2. Pasal 94 ayat (4) 3. Pasal 94 ayat (5)
7	Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi. 3. Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi. 	Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3)

No	Peraturan yang Mengaturnya	Koordinasi	Pasal yang Mengatur
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130)	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.	Pasal 32
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	Pasal 102 ayat (3), (4) dan (5)

Sumber : bahan hukum primer, diolah

Lembaga-lembaga pada Tabel 1 mempunyai landasan hukum masing-masing yang isinya saling bersinggungan. Meski bersinggungan, dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pada kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam , aktivitasnya belum terintegrasi sehingga pengamanan dan penegakkan hukum belum berjalan maksimal. Masing-masing instansi/kementerian terkait

mempunyai kebijakan, sarana prasarana, terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi serta sumber daya manusia yang berbeda-beda kewenangan.

beda. Hal tersebut menyebabkan sering

Tabel 3

Peraturan yang berlaku berkaitan dengan Koodinasi Penyidik

No	Peraturan yang Berkaitan Dengan Koordinasi Penyidik	Hal yang berkaitan dengan penyidikan
1.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)	Definisi, fungsi, tujuan, tugas dan wewenang,
2.	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Definisi, jenis, wewenang penyidik serta koordinasi kegiatan dengan penuntut umum.
3.	Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa	Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa
4.	Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sumber : Bahan Hukum primer, diolah

Hubungan koordinasi penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu:

1. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (1) KUHAP)

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana

yang sedang disidik kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)

4. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
5. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP)

PENUTUP

1. Kesimpulan

Koordinasi Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu hubungan tata cara kerja, pembinaan teknis, dan bantuan operasional penyidikan. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidik pegawai negeri sipil

tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum Polri. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum. Sesuai amanat KUHAP, Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Saran

Reformasi kebijakan harus diikuti dengan reformasi kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini karena persoalan keberadaan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam akan sangat mempengaruhi efektifitas pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan arah reformasi kebijakan itu sendiri. Hal ini sangat berkaitan dengan reformasi atas berbagai Kementerian sektoral yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian

Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah : (1) menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang belum selesai dengan mencermati adanya tumpang tindih kepentingan antarsektor; (2) menata kelembagaan dan aparatur pengelola sumber daya alam; (3) meningkatkan supervisi dan pembinaan terhadap aparatur pengelola sumber daya alam; (4) meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah; (5) meningkatkan kualitas SDM dan menambah sarana dan prasarananya; dan (6) meningkatkan upaya penegakan hukum secara lebih konsisten.

REFERENSI

Buku

- Djajaatmadja, Bambang Iriana. 2007. *Harmonisasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI: Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika: Jakarta

Ibrahim, Johnny 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.: Bayumedia: Malang.

Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju: Bandung.

Marzuki. Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Prenada Media: Jakarta.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP: Semarang

Pubacaraka. Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1978. *Perihal Kaedah Hukum*. Alumni: Bandung

Sergeant, G. 1975. *Texbook Of Sociology*. Mac Millan Education: London

Tim Penyusun FH UB. 2013. *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian & Penulisan Tesis dan Disertasi*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum UB: Malang.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

- 49; Tambahan Lembaran Negara No. 3419)
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 73)
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136)
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4),
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308)
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil